

**POTENSI LEMBAGA PERBENIHAN DALAM PENYEDIAAN
BENIH BERKUALITAS DI KABUPATEN TABANAN**
*(Potency of Institute Seed Germination In Providing Good Quality Seed
In Tabanan District)*

Ni Putu Sutami, A.A.N.B Kamandalu dan I Made Londra

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
email : tamiasih@yahoo.co.id
Hp. 081338466506

ABSTRAK

Ketersediaan benih berkualitas memiliki peran yang penting dalam kegiatan usahatani karena akan menunjang peningkatan produksi dan nilai tambah. Namun untuk memperoleh mutu benih yang baik tidaklah mudah karena usaha benih memiliki resiko tinggi. Peran lembaga perbenihan dalam pengadaan dan distribusi benih sering terlupakan karena dalam proses produksi sering berada dalam posisi lemah. Penelitian ini mengkaji potensi, kinerja dan permasalahan kelembagaan perbenihan padi dan melakukan identifikasi kebutuhan benih serta realisasi sertifikasi benih di Kabupaten Tabanan. Penelitian menggunakan metode survei dan secara deskriptif menganalisa sistem perbenihan formal sampai diadopsi oleh petani. Hasil penelitian menunjukkan sistem perbenihan di daerah melibatkan multi pihak, mulai dari produsen penangkar (BBU, BUMN/PT Pertani, petani/kelompok tani dalam wadah Subak dan BPTP Bali) sampai ke petani pengguna. Kemampuan Balai Benih Unggul (BBU) dan Balai Benih Induk (BBI) dalam penyediaan benih berkualitas di Kabupaten Tabanan sekitar 50% dari potensi yang ada. Hambatan perbenihan bukan dalam memproduksi benih, namun karena adopsi varietas unggul oleh petani rendah dan masih menjadi kendala untuk memadukan preferensi petani pengguna dan ketersediaan benih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk menguatkan penyediaan benih berkualitas supaya para penangkar dapat meningkatkan posisi tawar dan memenuhi permintaan pasar benih.

Kata kunci : Kelembagaan benih, benih berkualitas dan penangkar

ABSTRACT

The availability of good quality seeds has an important role in farming activities because it would support increasing production and added value. However, to obtain good quality seed is not easy because the seeds have a high-risk. The role of the seed in the procurement and distribution of seeds is often forgotten because in the production process are often in a weak position. The aim of this study will assess the potency, performance and institutional problems of paddy rice seeds and to identify the demand of seed and realization seed certification in Tabanan.

This study uses survey method and descriptive analyzes the formal seed system to be adopted by farmers. Seed systems in areas involving multi-parties, from manufacturers breeder (Seed Center, Nation State Enterprises / PT.Pertani, farmers / farmer groups in the Subak organization and also Bali Assessment Institute of Agricultural Technology (Bali AIAT)) to users. BBU and BBI capabilities in the provision of good quality seed in Tabanan district about 50% of the potential existing. Barriers seed is not in producing seed, but due to the adoption of improved varieties by farmers is low and still be an obstacle to combine user preferences and the availability of seed growers.

Results of this study are expected to be used to strengthen the provision of quality seeds so that seed grower can improve the bargaining position and meet the market demand for seed.

Keyword : *Institutional, quality seeds, and seed grower*

PENDAHULUAN

Benih merupakan salah satu input dalam proses produksi tanaman. Kualitas benih sangat berpengaruh terhadap penampilan dan hasil tanaman. Dengan demikian diperlukan adanya benih dengan varietas yang berdaya hasil tinggi dan mutu yang baik. Benih bermutu yang umumnya terdapat pada varietas unggul akan dirasakan manfaatnya oleh petani atau konsumen jika tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang sesuai. Kesadaran akan pentingnya penggunaan benih bermutu (berlabel), mendorong tumbuh berkembangnya usaha perbenihan. Ketersediaan benih yang memadai baik dari segi mutu, jumlah maupun harga masih menjadi faktor pembatas dalam menjalankan usahatani. Benih sebagai pembawa sifat dan keunggulan genetik dari suatu varietas semakin diperlukan, karena selain sebagai produk khusus, spesifik, peranannya dibutuhkan terus-menerus pada setiap musim tanam, dan tidak tergantikan oleh produk lain (Anonimus, 2008).

Benih padi di Provinsi Bali ditangkarkan oleh petani/penangkar atau produsen benih dalam bentuk perorangan atau badan hukum dan instansi pemerintah yang diawasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH). Peran BPSB TPH antara lain menyiapkan benih bermutu varietas unggul melakukan pengujian varietas, dan melaksanakan sertifikasi dan pengawasan mutu benih. Selain menghasilkan benih bermutu, BPSB TPH berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan sertifikasi benih.

Walaupun telah terdapat beberapa produsen benih di Indonesia, namun sampai saat ini kebutuhan benih yang baik dan berkualitas belum dapat dipenuhi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena kendala waktu saat produksi dan pemakaian benih yang belum sinkron serta kecocokan varietas yang diperlukan belum dapat dipenuhi secara baik (Wahyu Wibawa dkk, 2012). Agar kelangsungan persediaan benih padi tetap ada, berbagai cara dan usaha telah banyak dilakukan oleh pemerintah antara lain : a) mengembangkan dan meningkatkan kemampuan

lembaga perbenihan dari tingkat hulu sampai hilir, b) mengalihkan secara bertahap usaha pengadaan dan penyaluran benih komersial dari lembaga pemerintah kepada swasta, c) membimbing, membina dan mengawasi pengadaan benih yang bermutu dengan pertimbangan sertifikasi benih tetap ditangani pemerintah, d) mengusahakan agar pengadaan dan penyaluran benih berkualitas berkembang di masyarakat (khususnya bagi petani) yakni dengan tumbuh dan berkembangnya penangkar benih berbasis komunitas di sentra-sentra produksi, sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Agar kegiatan perbenihan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan sasaran yang diinginkan, pemerintah memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan perbenihan, baik kegiatan pemuliaan, produksi, maupun peredaran benih supaya pembinaan mutu benih jangan sampai tertinggal oleh permintaan petani maju (Mugnisjah dan Setiawan, 1995).

Perakitan varietas unggul baru (VUB) oleh Badan Litbang Pertanian merupakan langkah awal dari subsistem perbenihan disusul dengan kegiatan produksi dan perluasan program diseminasi varietas, termasuk penguatan kapasitas penyediaan benih sumber bagi penangkar. Benih-benih varietas baru dari pemulia yang jumlahnya terbatas disampaikan kepada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali untuk diuji adaptasi bersama-sama dengan pemerintah daerah sehingga dapat dipilih varietas yang cocok dan disukai oleh petani. Hal ini dilaksanakan mengingat areal pertanian di Indonesia yang bersifat spesifik baik lingkungan fisik maupun preferensi masyarakat.

Kelembagaan perbenihan adalah unit-unit kerja yang secara terorganisasi melakukan aktivitas di bidang perbenihan. Peranan kelembagaan dipandang penting dalam akselerasi pembangunan pertanian karena di dalamnya tercermin kebijakan pemerintah dan program yang mendukung organisasi petani. Untuk menghasilkan inovasi pertanian spesifik lokasi yang lebih dekat pada kebutuhan petani dan berbasis pada keunggulan sumberdaya lokal, maka dipandang perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait antara pemerintah, swasta dan petani guna memecahkan persoalan penyediaan benih berkualitas. Sampai saat ini belum ada kajian yang memberikan gambaran sinergi sistem penyediaan benih berkualitas yang dilakukan oleh kelembagaan perbenihan maupun pihak swasta terkait dengan sistem perbenihan di Kabupaten Tabanan yang dikenal sebagai lumbung beras Provinsi Bali. Peran kelembagaan perbenihan seperti Balai Benih Unggul (BBU) dan kelembagaan lokal yang ada di tingkat lapangan dalam penyediaan benih berkualitas diharapkan menjadi sistem perbenihan yang tangguh (produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan) dalam upaya penyediaan benih berkualitas dan peningkatan produksi (Kementerian Pertanian, 2010). Hal ini hanya mungkin terlaksana jika kebijakan pemerintah sepenuhnya mendukung sistem perbenihan padi berkualitas.

TUJUAN

Pengkajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan program yang tepat dalam penyediaan benih berkualitas di Kabupaten Tabanan sehingga dipandang perlu untuk mengetahui potensi, kinerja dan permasalahan kelembagaan perbenihan padi di Kabupaten Tabanan, dan melakukan identifikasi kebutuhan benih serta realisasi sertifikasi benih yang menunjang sistem perbenihan di Kabupaten Tabanan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian peran lembaga perbenihan dalam penyediaan benih berkualitas dilakukan di Kabupaten Tabanan. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan wilayah ini memiliki petani penangkar yang paling banyak. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2013. Populasi yang dijadikan sampel adalah seluruh pemangku kepentingan yang meliputi instansi pemerintah, pihak swasta maupun petani penangkar. Penentuan sampel pemerintah dilakukan untuk mencari informasi yang terkait dengan BBU di tingkat kabupaten dan BBI di tingkat provinsi. Penentuan sampel penangkar mewakili penangkar swasta, BUMN dan petani penangkar.

Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survei dan wawancara mendalam kepada informan kunci yang terkait dengan penyediaan benih berkualitas. Data sekunder diperoleh dari publikasi atau laporan instansi terkait berupa data kuantitatif seperti kebutuhan benih, jumlah kelembagaan dan sertifikasi benih, sedangkan data kualitatif berupa pernyataan verbal seperti kebijakan dan persepsi pemangku kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem dan Alur Perbenihan

Ada 3 sistem yang mendukung pelaksanaan perbenihan padi antara lain : i) Sub sistem penelitian, ii) Sub sistem produksi dan iii) Sub sistem pengawasan dan sertifikasi benih. Sub sistem penelitian diawali dengan penelitian suatu varietas unggul baru (VUB) disusul dengan kegiatan produksi Benih Penjenis (Breeder Seed) dan turunannya benih dasar dan benih pokok yang lazim disebut benih sumber. Untuk sub sistem produksi, diawali dengan kegiatan untuk menghasilkan benih sumber yang saat ini ditangani oleh kelembagaan perbenihan pemerintah seperti UPTD BBI yang ada di Desa Lulus dan BBU yang berada di Desa Timpag serta BPTP Bali akan memperbanyak benih penjenis untuk dijadikan benih sumber bagi kelembagaan penangkar benih komersial seperti Kelompok tani, Gapoktan, Koperasi, dan kelompok Penangkar. Untuk sub sistem pengawasan dan sertifikasi dilakukan oleh BPSP TPH sebagai lembaga pemerintah provinsi yang bertugas di kabupaten sebagai penjamin mutu benih yang diedarkan secara komersial.

Syarat daripada sertifikasi benih padi agar diberikan penjaminan mutu oleh BPSP TPH antara lain petani penangkar harus terdaftar sebagai produsen benih dengan mengajukan permohonan untuk ikut serta dalam sertifikasi sejak dari perencanaan pertanaman, lokasi tanam, keabsahan benih sumber yang digunakan, adanya isolasi (waktu, jarak), lulus pemeriksaan lapangan sampai pada lulus uji laboratorium. Setelah lulus uji laboratorium barulah calon benih yang dihasilkan dapat dinyatakan sebagai benih berkualitas serta diijinkan untuk diperjualbelikan secara legal. Penggunaan benih sumber oleh penangkar akan menghasilkan benih kelas dibawahnya dan bisa dikembangkan lagi untuk menghasilkan benih sebar yang dapat dikembangkan oleh petani secara berkelanjutan untuk dikonsumsi.

Kebutuhan Benih Padi Berkualitas

Benih unggul padi merupakan salah satu hasil inovasi dalam bidang pertanian yang diperkenalkan oleh para pakar dan peneliti. Inovasi benih padi unggul tersebut perlu disebarkan secara luas kepada para petani untuk selanjutnya dikembangkan di lapangan. Pemerintah berupaya memasyarakatkan inovasi benih varietas unggul nasional di kalangan petani melalui program BLBU yang dilakukan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya padi. Oleh karena itu upaya pengadaan benih perlu terus ditingkatkan dan dimantapkan untuk mengantisipasi kebutuhan yang semakin meningkat. Dalam hal ini kegiatan sertifikasi benih, pelabelan, pengawasan pemasaran dan pengujian benih laboratoris mempunyai peran yang besar.

Pemasok benih padi terbesar saat ini adalah PT. Sang Hyang Seri dan PT. Pertani. Kebijakan pemerintah untuk menggunakan benih berkualitas diapresiasi dengan baik oleh para petani. Terbukti 100% benih unggul padi sawah di Kabupaten Tabanan dimanfaatkan sebagai bahan tanam.

Dalam upaya pengadaan benih berkualitas, peran pengawasan mutu dan sertifikasi benih sangat besar. Bentuk apresiasi pemerintah dilakukan dengan membentuk unit pelaksanaan teknis di daerah yaitu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) yang bertugas untuk melaksanakan sertifikasi, pengawasan pemasaran dan pengujian benih laboratoris.

Sertifikasi benih adalah suatu cara pemberian sertifikat atas cara perbanyakan, produksi dan pengolahan benih yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuan dilakukannya sertifikasi benih adalah untuk memelihara kemurnian genetik benih dari varietas unggul serta menyediakannya secara kontinyu bagi para petani.

Kelas-kelas benih dalam sertifikasi benih meliputi: Benih penjenis (BS) adalah benih yang diproduksi oleh dan dibawah pengawasan Pemulia Tanaman yang bersangkutan atau Instansinya. Benih ini merupakan Sumber perbanyakan Benih Dasar.

Benih Dasar (BD) adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis. Benih Dasar diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat

sehingga kemurnian varietas dapat terpelihara. Benih dasar diproduksi oleh Instansi/Badan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan produksinya disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi benih.

1. Benih Pokok (BP) adalah keturunan dari Benih Penjenis atau Benih Dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas yang ditetapkan dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu yang di tetapkan dan harus disertifikasi sebagai Benih Pokok oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
2. Benih Sebar (BR) adalah keturunan dari Benih Penjenis, Benih Dasar atau Benih Pokok yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat dipelihara, memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan serta harus disertifikasi sebagai Benih Sebar oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Dinas Pertanian yang berkedudukan di provinsi maupun kabupaten/kota merupakan kepanjangan tangan dari gubernur atau bupati/walikota, berperan sebagai pembina perbenihan di daerah, terutama dalam pembinaan produksi dan distribusi benih. Dalam melakukan pembinaan perbenihan, Dinas Pertanian Kabupaten hanya memiliki satu pelaksana teknis, yaitu Balai Benih Kabupaten.

Kebutuhan benih padi berkualitas tidak setiap saat terpenuhi. Walaupun benih padi mudah dan selalu ditanam, namun pada saat tertentu ketersediaannya bisa berkurang. Itulah sebabnya permintaan benih padi tidak bisa dikotak-kotakan dalam suatu wilayah. Kebutuhan benih bermutu di Provinsi Bali mencapai 3.775 ton pertahun dengan potensi luas tanam 151.000 ha. Kebutuhan benih ini sudah termasuk untuk kegiatan SL-PTT dan BLBU (IB K Suastika, 2012).

Kebutuhan benih padi non hibrida untuk BLBU pada tahun 2011 mencapai 1000 ton dengan luas areal tanam 40.000 ha. Kebutuhan benih terbanyak diminta oleh Kabupaten Tabanan yang mencapai 29% dari total kebutuhan benih BLBU pada tahun tersebut, walau tidak memiliki luas wilayah seluas Kabupaten Buleleng yang memiliki luas lahan terbesar yaitu 24,23% dari luas Provinsi Bali (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2011).

Kebutuhan benih padi non hibrida untuk BLBU pada tahun 2012 mencapai 847,5 ton dengan luas areal tanam 33.900 ha. Bila dibandingkan kondisi tahun sebelumnya tampak terjadi penurunan permintaan sebanyak 15,25%. Banyak faktor yang menjadi penyebab menurunnya kebutuhan BLBU, kemungkinan pengaruh kekeringan sehingga terjadi penundaan atau pergeseran waktu tanam (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2012).

Bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah selain BLBU padi non hibrida, juga diberikan bantuan benih padi hibrida. Kabupaten yang menerima bantuan benih padi hibrida hanya 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Gianyar. Bantuan BLBU baik untuk padi non hibrida maupun hibrida masih sangat kecil dibandingkan total kebutuhan benih yang dibutuhkan. Total kebutuhan

BLBU padi hibrida baru 2 tahun (2011 dan 2012) mencapai luasan 41.640 ha atau sekitar 27,57% dari total kebutuhan benih di Bali. Sedangkan kebutuhan BLBU padi non hibrida mencapai 23,77% dari total luasan 35.900 ha. Data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan (2012) menunjukkan sebagian besar (lebih dari 70%) benih berkualitas dibutuhkan untuk luar BLBU.

Potensi penyediaan benih berkualitas di Kabupaten Tabanan oleh penangkar menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Hal ini terlihat dari jumlah produksi benih yang diujikan dengan lulus uji meningkat. Tahun 2011 yang diujikan 802.76 ton dan yang lulus uji sebanyak 761.39 ton (94,84%) (BPSBTPH Bali, 2012). Dan untuk pengajuan sertifikasi benih tahun 2012 jumlah produksi benih lulus uji dan yang diajukan menunjukkan bahwa semua lulus uji 655.06 ton (100%) (BPSBTPH Bali, 2013).

Diseminasi varietas unggul baru sampai tahun 2012 sudah mencapai 26 jenis dengan luasan 126.006,73 ha, dengan permintaan varietas Cihurang paling dominan (57,47%) diikuti oleh Cigeulis (21,84%), Inpari 6 (5,43%) serta IR 64 sekitar 2%. Sebenarnya IR64 masih diminati, namun karena sulit dicari di pasaran maka secara perlahan-lahan varietas tersebut mulai ditinggalkan. Pemerintah akan membantu petani dalam subsidi harga benih untuk meningkatkan daya beli petani terhadap varietas unggul.

Peran Kelembagaan Perbenihan dalam Penyediaan Benih Berkualitas

Di Provinsi Bali terdapat tujuh kabupaten yang melaksanakan kegiatan penangkaran benih padi, kecuali Kabupaten Karangasem dan Bangli. Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung beras memiliki lembaga perbenihan paling banyak (Tabel 1).

Hal spesifik yang dijumpai di lapangan adalah penyediaan benih berkualitas melalui kelompok-kelompok tani dengan berbasis Subak karena tidak satupun kegiatan pengadaan tanaman padi tanpa melibatkan Subak. Organisasi petani dalam wadah Subak telah dikenal solid dalam menyepakati pengaturan air, jadwal tanam dan varietas yang diinginkan anggota Subak. Semuanya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Oleh karena itu sebutan ketua subak yaitu Pekaseh sangat penting. Lembaga pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN yang akan bekerjasama dengan kelompok tani dalam pengadaan benih selalu melalui pendekatan dengan Pekaseh terlebih dahulu agar lebih mudah mencari anggota petani yang mau bekerjasama dengan pihak luar.

Tabel 1. Kelompok penangkar yang ada di Kabupaten Tabanan

No	Nama Produsen/Penangkar	Alamat	Kelas
1	UPT BBITPH	Desa Timpag, Kec. Kerambitan	BD, BP
2	UPTD perbenihan Bongan	Subak Bongan, Desa Bongan	BP, BR
3	Koperasi KUAT Subak Guama	Desa Selanbawak, Kec. Marga	BD, BP
4	UD Wahyu Sani Arta	Subak Kukuh, Desa Kukuh, Kec. Marga	BP, BR
5	CV Sunari Gading	Desa Batannyuh, Kec. Marga	BD, BP, BR
6	UD Bali Bangun Persada	Subak Nyitdah, Desa Pandak, Kec. Kediri	BD
7	Kelompok Subak Babakan Wana Sari	Desa Wanasari, Kec. Tabanan	BR
8	Kelompok Subak Anyar Surabrata	Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg	BR
9	PT Pertani	Subak Gungungan, Desa Wanasari	BP, BR
10	I Wayan Sukanada	Subak jakadayang, Kec. Marga	BD
11	I Ketut Suka Ardana	Subak Bongan, Desa Bongan	BP, BR
12	Kelompok Penangkar Subak Jadi	Subak Jadi, Desa Banjar Anyar, Kediri	BR

Selain adanya penangkar, distribusi atau pemasaran benih dari produsen ke konsumen sangat didukung oleh adanya pedagang atau penyalur benih. Di Kabupaten Tabanan terdapat kurang lebih 10 pedagang yang memasarkan benih dengan kemampuan penyaluran 1.225 ton/tahun. Salah satu penangkar yang ada di Kabupaten Tabanan yaitu KUAT Subak Guama bahkan sudah pernah melakukan penangkaran terhadap benih penjenis (BS) yang dibawa dan diuji kerjasamakan dalam kegiatan UPBS. Selain dengan BPTP penangkar KUAT Subak Guama tetap menjalin kerjasama dengan BBI, BBU dan petani penangkar yang tidak saja berlokasi di Tabanan namun untuk seluruh penangkar di Provinsi Bali.

Hasil survei di Subak Babakan Wanasari, secara perorangan sudah menjalani usaha penangkaran sejak tahun 2005. Dengan luas Subak 53 Ha, tidak semua anggota Subak melakukan kegiatan penangkaran. Hanya 80 orang dari 120 orang yang terlibat dengan menangkan benih kelas BP. Di kelompok ini sudah tidak ada yang menangkan kelas BD dengan alasan harga benih lebih mahal dan pengawasan pertumbuhannya (*rouging*) lebih susah, varietas yang sering ditangkarkan adalah Varietas Ciherang dan Sidenuk (2 Ha). Pemasaran dilakukan ke seluruh anggota Subak dan PT SHS serta sudah mendapat tawaran untuk menjual ke GPS (Gerakan Pangan Serasi). Perusahaan swasta yang ikut andil dalam kegiatan penangkaran adalah UD Wahyu Sari Artha. Perusahaan ini bekerjasama dengan Subak Sungsang yang ada di Desa Tibubiu yang menangkan kelas benih BP.

Kendala dalam penangkaran dan distribusi benih yang dijumpai di lapangan antara lain pengadaan sumber benih tidak sesuai dengan permintaan petani pengguna yang lebih menyukai varietas Ciherang dibandingkan Inpari. Dari hasil

survey juga menunjukkan bahwa petani penangkar akan mengadakan kegiatan penangkaran apabila ada program dari pihak pemerintah dan pihak swasta (PT. Pertani, dll) melalui program kemitraan sehingga pemasarannya dapat langsung ditampung oleh pihak swasta yang merupakan mitra. Pemasaran juga merupakan faktor penghambat dalam melakukan penangkaran khususnya mengenai jaminan harga. Hasil produksi petani penangkar tidak semuanya dibeli oleh pihak yang membutuhkannya dengan harga yang lebih tinggi, sehingga petani penangkar masih banyak yang menjual hasil penangkarannya dalam bentuk beras yang siap dikonsumsi, karena perhitungan petani merasa lebih untung dari pada jual gabah/benih yang harga tawarnya sangat rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian tentang potensi lembaga perbenihan dalam penyediaan benih berkualitas di Kabupaten Tabanan maka dapat disimpulkan :

1. Kebijakan dan program perbenihan di daerah mengikuti kebijakan yang telah dicanangkan di tingkat pusat. Sistem perbenihan di tingkat pusat melibatkan multi pihak mulai dari produsen penangkar (BBI, BBU, BUMN, PT Pertani, kelompok tani dalam wadah Subak, BPTP) sampai ke petani pengguna dengan melibatkan jejaring komunikasi untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran benih berkualitas
2. Identifikasi antara kebutuhan benih dan realisasi sertifikasi benih berkualitas di Kabupaten Tabanan masih belum terpenuhi. Selain kuantitas, jenis varietas masih menjadi ganjalan dalam memenuhi preferensi petani pengguna
3. BBI dan BBU dalam penyediaan benih berkualitas belum bisa mencukupi kebutuhan petani karena kendala terbatasnya sumberdaya lahan, infrastruktur dan pembiayaan. Oleh karena itu perbenihan tidak saja bisa dilakukan oleh instansi pemerintah, tetapi multi pihak yang perlu diperkuat melalui sistem kelembagaan terutama di sentra-sentra produksi

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, 2008. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2008. Direktori Padi Indonesia 2008. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Subang
- BPSBTPH Bali, 2012. Realisasi Sertifikasi Benih Non Hibrida Tahun 2011. BPSBTPH Bali. Denpasar
- BPSBTPH Bali, 2013. Realisasi Sertifikasi Benih Non Hibrida Tahun 2012. BPSBTPH Bali. Denpasar
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2011. Surat Keputusan Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul dari Berbagai Kabupaten di Bali tahun 2011

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2012. Surat Keputusan Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul dari Berbagai Kabupaten di Bali tahun 2012
- IB K Suastika, 2012. Laporan Akhir Tahun Perbenihan 2012. BPTP Bali, Denpasar
Kementerian Pertanian. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014
- Mugnisjah, W.Q., dan Setiawan, A., 1995, Pengantar Produksi Benih, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyu Wibawa dan Yesmayati, 2012. Potensi Lembaga Perbenihan dalam Penyediaan Benih Padi di Propinsi Bengkulu. Laporan Akhir. BPTP Bengkulu.